



**PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
DINAS SOSIAL**

Jl. A.Yani Komplek Perkantoran Pemda, Kel. Kasongan Lama, Kec. Katingan Hilir
Website: <https://dinsos.katingankab.go.id> Email: dinassosialkatingan@gmail.com
K A S O N G A N

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 565 TAHUN 2023**

TENTANG

PETA PROSES BISNIS DINAS SOSIAL KABUPATEN KATINGAN

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KATINGAN

- Menimbang : a. bahwa peta proses bisnis bagian penataan Ketatalaksanaan yang merupakan salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur;
- b. bahwa dalam mewujudkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi perlu dilakukan penataan tatalaksana melalui penyusunan Peta Proses Bisnis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Katingan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Negara Nomor 4180);

3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan Tatalaksana (*Bussiness Proses*);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
9. Peraturan Bupati Katingan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Katingan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KATINGAN TENTANG PETA PROSES BISNIS DINAS SOSIAL KABUPATEN KATINGAN.

KESATU : Peta Proses Bisnis Dinas Sosial Kabupaten Katingan sebagaimana tercantum dalam lampiran selaras dengan tujuan dan sasaran strategis Dinas Sosial Kabupaten Katingan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA : Peta Proses Bisnis Dinas Sosial Kabupaten Katingan sebagaimana pada Diktum KESATU wajib dilaksanakan dalam rangka memberikan dasar yang kuat bagi penyusunan Standar Operasional Prosedur yang lebih sederhana, efisiensi, efektif, produktif dan akuntabel.
- KETIGA : Dalam hal terdapat perubahan atas kebutuhan, tujuan dan sasaran serta tatakelola organisasi maka Peta Proses Bisnis Dinas Sosial Kabupaten Katingan dapat dilakukan penyesuaian;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kasongan
Pada tanggal, 8 Agustus 2023

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Katingan,



ELMON SIANTURI, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19640428 198603 1 006

Tembusan :

1. Bupati Katingan
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan
 - Up.a. Kepala Bagian Hukum
 - b. Kepala Bagian Organisasi

IDENTIFIKASI PROSES BISNIS
BERDASARKAN RENSTRA DINAS SOSIAL KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8
MISI 1: MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH, BERWIBAWA DAN INOVATIF SERTA MEWUJUDKAN SUPREMASI HUKUM							
1	Meningkatnya kapasitas kelembagaan	Meningkatkan penerapan reformasi birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan jasa surat menyurat 2. Menyediakan kebutuhan jasa komunikasi, air dan listrik 3. Menyediakan jasa pelayanan administrasi keuangan 4. memelihara kendaraan dinas/operasional. 5. menjaga kebersihan kantor. 6. Memelihara Peralatan kerja 7. Menyediakan alat tulis kantor 8. Menyediakan kebutuhan cetak dan penggandaan. 9. Menyediakan kebutuhan listrik/penerangan kantor. 10. Menyediakan bahan bacaan dan peraturan perundangan. 11. Menyediakan makan dan minum pegawai. 12. Menganggarkan biaya perjalanan dinas luar daerah 13. Melakukan pembinaan pegawai non PNS. 14. Menyediakan kebutuhan papan pengumuman. 15. Menganggarkan biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah. 	<p>Persentase Unit Kerja Internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran</p> <p>Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya</p> <p>Persentase sarana dan prasarana yang tersedia untuk menunjang pelayanan</p>	<p>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</p> <p>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</p> <p>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</p>	<p>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</p> <p>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</p> <p>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</p>	<p>DINAS SOSIAL (Bidang Sekretariat)</p> <p>DINAS SOSIAL (Bidang Sekretariat)</p> <p>DINAS SOSIAL (Bidang Sekretariat)</p>

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
				Tingkat ketepatan waktu perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	DINAS SOSIAL (Bidang Sekretariat)
		Meningkatkan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja. 2. Menyusun laporan keuangan semesteran. 3. Melaporkan prognosis realisasi anggaran. 4. Menyusun laporan keuangan akhir tahun. 5. Membuat laporan tahunan, LAKIP dan Rencana Kerja Tahunan 	Nilai LAKIP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	DINAS SOSIAL (Bidang Sekretariat)
		Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengirim pegawai mengikuti BIMTEK, Pelatihan dan lain sebagainya. 				

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
		Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan fasalitasi Gedung kantor. 2. Menyediakan kendaraan dinas/operasional. 3. Menyediakan perlengkapan Gedung kantor 4. Memelihara secara berkala Gedung kantor. 5. Menyediakan pakaian dinas beserta kelengkapannya bagi aparatur. 				
MISI 4: MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN, PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN SERTA KELUARGA BERENCANA DAN KESETARAAN GENDER							
1	Meningkatnya Kesejahteraan social PPKS	Memberdayakan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kemampuan petugas dan pendamping social 2. Meningkatkan kemampuan dan skill Masyarakat penerima manfaat bantuan social. 3. Meningkatkan keterampilan dan skill keluarga miskin. 4. Meningkatkan keterampilan dan skill PMKS lainnya. 5. Melakukan verivali data BDT secara berkala dan berkesinambungan. 6. Memberdayakan komunitas adat terpencil 7. Melakukan sosialisasi verivali data bagi aparatur desa dan TKSK. 8. Melaksanakan penyaluran Bansos Rastra dan BPNT. 9. Melakukan koordinasi terkait Bansos Rastra dan BPNT. 	Persentase PMKS yang mendapat Bantuan Sosial	Program Pemberdayaan Fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	DINAS SOSIAL (Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan FM)
				Jumlah areal pemakaman yang terbangun dan terpelihara	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	DINAS SOSIAL (Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan FM)
				Persentase Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	DINAS SOSIAL (Bidang Pemberdayaan Sosial)

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
			10. Melaksanakan sosialisasi Bansos Rastra dan BPNT agar tepat sasaran. 11. Melakukan sosialisasi program Rutilahu kepada Masyarakat yang membutuhkan. 12. Melakukan koordinasi pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyaluran Bansos Rastra dan BPNT. 13. Melakukan monev Kelompok Usaha Bersama. 14. Melakukan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan 15. Melakukan sosialisasi relokasi makam 16. pahlawan yang ada di daerah ke Taman Makam.				
		Memberdayakan Lembaga kesejahteraan sosial secara optimal	1. memberdayakan Karang Taruna. 2. Melestarikan nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan 3. Meningkatkan kapasitas pelayanan LK3. 4. Memberdayakan Yayasan social di Kabupaten Katingan. 5. Memberdayakan TKS/TKSK/BDT SIKS-NG	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang diberdayakan	Program pemberdayaan lembaga kesejahteraan sosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	DINAS SOSIAL (Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan FM)
				Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial Dan Komunitas Adat Terpencil Yang Diberdayakan	Program Pemberdayaan Sosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	DINAS SOSIAL (Bidang Pemberdayaan Sosial)
		Melakukan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan	1. Memberikan bantuan akses sarana dan prasarana public bagi Lansia dan penyandang cacat.	Persentase PMKS tertangani	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	DINAS SOSIAL (Bidang Rehabilitasi Sosial)

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
		social secara menyeluruh dan merata	<ol style="list-style-type: none"> 2. Melakukan KIE konseling dan kampanye social. 3. Melakukan penanganan terhadap ODGJ dan disabilitas kejiwaan. 4. Membubarkan lokasi prostitusi. 5. Melakukan pelatihan keterampilan bagi penghuni lokalisasi 6. Membina dan melatih keluarga ODGJ dalam hal perawatan dan penanganan ODGJ. 7. Melakukan pelatihan bagi Ex ODGJ agar mampu mandiri dan berusaha. 8. Melakukan pelatihan keterampilan bagi EX Penyalahgunaan Narkoba. 9. Memenuhi kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas. 10. Memenuhi kebutuhan dasar bagi lansia. 11. Melakukan penanganan terhadap orang terlantar (SPM) 12. Melakukan pembinaan dan pelatihan bagi anak terlantar, anak jalanan, anak cacat dan anak nakal 	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usi Ia Terlantar Dan Gelandangan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti	Program Rehabilitasi Sosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	DINAS SOSIAL (Bidang Rehabilitasi Sosial)
	Meningkatnya jangkauan perlindungan dan jaminan sosial	Melakukan penanggulangan dan penanganan bencana serta melaksanakan perlindungan dan jaminan social masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan dampingan dan bimbingan kepada penerima PKH. 2. Melakukan penyaluran dan monitoring dana PKH di Kecamatan 3. Memberikan edukasi family development social (FDS) bagi KPM PKH. 4. Membina dan memberdayakan pendamping PKH. 5. Melaporkan secara berkala pengelolaan PKH. 	<p>Persentase Desa Yang Aktif Melakukan Update Data Kesejahteraan Sosial</p> <p>Persentase Korban Bencana yang mendapat Bantuan Sosial</p>	<p>Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial</p> <p>Program Penanggulangan Bencana, Perlindungan dan Jaminan Sosial</p>	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	<p>DINAS SOSIAL (Bidang Fakir Miskin)</p> <p>DINAS SOSIAL (Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial)</p>

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
			<p>6. Melakukan Sosialisasi kegiatan tahunan PKH di Kabupaten.</p> <p>7. Melakukan sosialisasi pencegahan dan pengurangan resiko bencana di daerah rawan bencana.</p> <p>8. Menyediakan kebutuhan dasar bagi korban bencana paska bencana terjadi.</p> <p>9. Mengerahkan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) ke lokasi bencana</p> <p>10. Menyiapkan anggaran untuk masalah-masalah strategis yang menyangkut cepat tanggap darurat dan KLB Bencana Sosial.</p> <p>11. Memfasilitasi pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB) Melakukan layanan dukungan psikososial dalam siklus penanggulangan bencana.</p>	<p>Persentase Korban Bencana Alam Dan Sosial Yang Terpenuhi</p> <p>Kebutuhan Dasarnya Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana</p>	<p>Program Penanganan Bencana</p>	<p>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</p>	<p>DINAS SOSIAL (Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial)</p>

**IDENTIFIKASI PETA PROSES BISNIS
BERDASARKAN RENSTRA DINAS SOSIAL KABUPATEN KATINGAN TAHUN
2018-2023**

NO	Penjabaran MISI Kedalam , SASARAN (nama proses)	UTAMA/ PENDUKUNG/ LAINNYA	KODE
	MISI-1 MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH, BERWIBAWA, DAN INOVATIF SERTA MEWUJUDKAN SUPREMASI HUKUM		
1	MENINGKATKAN PENERAPAN REFORMASI BIROKRASI	PENDUKUNG	DINSOS 16
	MISI-4 MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN, PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN SERTA KELUARGA BERENCANA DAN KESETARAAN GENDER		
1	MEMBERDAYAKAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL	UTAMA	DINSOS 1 DINSOS 2 DINSOS 3
2	MEMBERDAYAKAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL SECARA OPTIMAL	UTAMA	DINSOS 4 DINSOS 5
3	MELAKUKAN PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOCIAL SECARA MENYELURUH DAN MERATA	UTAMA	DINSOS 6 DINSOS 7
4	MELAKUKAN PENANGGULANGAN DAN PENANGANAN BENCANA SERTA MELAKSANAKAN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOCIAL MASYARAKAT	UTAMA	DINSOS 8 DINSOS 9

IDENTIFIKASI SUB PROSES-LINTAS FUNGSI DINAS SOSIAL KABUPATEN KANTINGAN

(Nomenklatur PMDN No. 90/2019 yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri No. 050 - 3708 Tahun 2020)

NO	SUB PROSES	KODE SUB PROSES	NAMA LINTAS FUNGSI	KODE LINTAS FUNGSI	PENANGUNG JAWAB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
MISI 1: MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH, BERWIBAWA, DAN INOVATIF SERTA MEWUJUDKAN SUPREMASI HUKUM					
SS-1	MENINGKATKAN PENERAPAN REFORMASI BIROKRASI				
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	DINSOS 11	Nilai LAKIP	DINSOS 11	Sekretariat
MISI 4: MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN, PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN SERTA KELUARGA BERENCANA DAN KESETARAAN GENDER					
1	Meningkatkan Program Pemberdayaan Sosial	DINSOS 5	Peningkatan lembaga kesejahteraan sosial dan komunitas adat terpencil yang diberdayakan	DINSOS 5	Bidang Pemberdayaan Sosial
2	Meningkatkan Program Rehabilitasi Sosial	DINSOS 7	Peningkatan penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	DINSOS 7	Bidang Rehabilitasi Sosial
3	Meningkatkan Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	DINSOS 8	Peningkatan desa yang aktif melakukan update data kesejahteraan sosial	DINSOS 8	Bidang Fakir Miskin
4	Meningkatkan Program Penanganan Bencana	DINSOS 10	Peningkatan penanganan korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	DINSOS 10	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

PETA RELASI DAN PETA LINTAS FUNGSI PETA PROSES BISNIS DINAS SOSIAL KABUPATEN KATINGAN BERDASARKAN RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023

INPUT

**KEBIJAKAN /
REGULASI**

**KOORDINASI
DAN
SINKRONISASI
DATA**

**PERMINTAAN
INFORMASI,
KONSULTASI
DAN LAYANAN**

UTAMA

**DINSOS 01
PENINGKATAN PROGRAM
PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KAT
DAN PMKS LAINNYA**

**DINSOS 02
PENINGKATAN PROGRAM
PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN**

**DINSOS 03
PENINGKATAN PROGRAM
PENGELOLAAN TAMAN MAKAM
PAHLAWAN**

**DINSOS 04
PENINGKATAN PROGRAM
PEMBERDAYAAN LEMBAGA
KESEJAHTERAAN SOSIAL**

**DINSOS 05
PENINGKATAN PROGRAM
PEMBERDAYAAN SOSIAL**

**DINSOS 06
PENINGKATAN PROGRAM
PELAYANAN DAN REHABILITASI
KESEJAHTERAAN SOSIAL**

**DINSOS 07
PENINGKATAN PROGRAM
REHABILITASI SOSIAL**

**DINSOS 08
PENINGKATAN PROGRAM
PERLINDUNGAN DAN JAMINAN
SOSIAL**

**DINSOS 09
PENINGKATAN PROGRAM
PENANGGULANGAN BENCANA,
PERLINDUNGAN DAN JAMINAN
SOSIAL**

**DINSOS 10
PENINGKATAN PROGRAM
PENANGANAN BENCANA**

PENDUKUNG

**DINSOS 11
PENINGKATAN PROGRAM
PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN**

**DINSOS 12
PENINGKATAN PROGRAM
PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR**

**DINSOS 13
PENINGKATAN PROGRAM
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR**

**DINSOS 14
PENINGKATAN PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PERENCANAAN DAN
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN**

**DINSOS 15
PENINGKATAN PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

OUTPUT

1. DOKUMEN SPM

**2. SDM YANG
BERKOMPETEN DAN
TERAMPIL**

**3. PELAYANAN
PUBLIK YANG BAIK**

**4. KESEJAHTERAAN
SOSIAL PPKS
MENINGKAT**

PETA RELASI

MISI – 4 MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN, PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN SERTA KELUARGA BERENCANA DAN KESETARAAN GENDER

DINAS SOSIAL KABUPATEN KATINGAN

INPUT

KEBIJAKAN /
REGULASI

KOORDINASI
DAN
SINKRONISASI
DATA

PERMINTAAN
INFORMASI,
KONSULTASI
DAN
LAYANAN

DINSOS 01
PENINGKATAN PROGRAM
PEMBERDAYAAN FAKIR
MISKIN, KAT DAN PMKS

1. Dinas Sosial
2. Instansi Terkait
3. Masyarakat/Lembaga

DINSOS 02
PENINGKATAN PROGRAM
PENGELOLAAN AREAL
PEMAKAMAN

1. BKAD
2. Dinas Sosial
3. Petugas TMP
4. Masyarakat

DINSOS 03
PENINGKATAN PROGRAM
PENGELOLAAN TAMAN
MAKAM PAHLAWAN

1. Dinas Sosial
2. Masyarakat/Lembaga

DINSOS 04
PENINGKATAN PROGRAM
PEMBERDAYAAN LEMBAGA
KESEJAHTERAAN SOSIAL

1. Dinas Sosial
2. Kecamatan
3. Desa/Kelurahan

DINSOS 05
PENINGKATAN PROGRAM
PEMBERDAYAAN SOSIAL

1. Dinas Sosial
2. Bapedalitbang,
Kehutanan, Dukcapil,
Perkim
3. Lembaga/Instansi
4. Kecamatan
5. Desa/Kelurahan
6. Kementerian Sosial

DINSOS 06
PENINGKATAN PROGRAM
PELAYANAN DAN
REHABILITASI
KESEJAHTERAAN SOSIAL

1. Dinas Sosial
2. Satpol PP
3. Dinas Kesehatan
4. Instansi Lainnya

DINSOS 07
PENINGKATAN PROGRAM
REHABILITASI SOSIAL

1. Dinas Sosial
2. Satpol PP
3. Dinas Kesehatan
4. Instansi Lainnya

DINSOS 08
PENINGKATAN PROGRAM
PERLINDUNGAN DAN JAMINAN
SOSIAL

1. Dinas Sosial
2. Desa/Kelurahan
3. Dukcapil
4. Masyarakat/Lembaga

1. Dinas Sosial
2. Kecamatan dan Desa

DINSOS 09
PENINGKATAN PROGRAM
PENANGGULANGAN
BENCANA, PERLINDUNGAN
DAN JAMINAN SOSIAL

1. Dinas Sosial
2. Desa/Kelurahan
3. Dukcapil
4. Masyarakat/Lembaga

1. Dinas Sosial
2. Kecamatan dan Desa

DINSOS 10
PENINGKATAN PROGRAM
PENANGANAN BENCANA

1. Dinas Sosial
2. Kecamatan dan Desa

1. Dinas Sosial
2. Bupati
3. BPBD

OUTPUT

1. DOKUMEN SPM

2. SDM YANG
BERKOMPETEN
DAN TERAMPIL

3. PELAYANAN
PUBLIK YANG BAIK

4. KESEJAHTERAAN
SOSIAL PPKS
MENINGKAT

PETA RELASI

MISI – 1 MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH, BERWIBAWA, DAN INOVATIF
SERTA MEWUJUDKAN SUPREMASI HUKUM

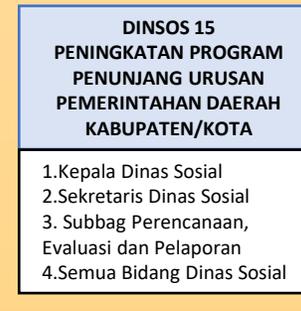
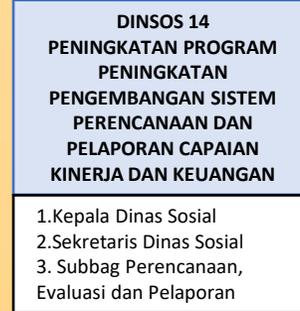
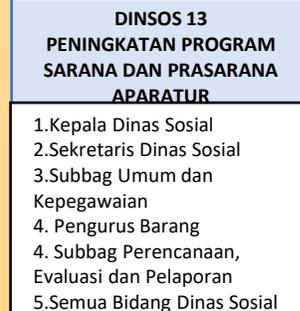
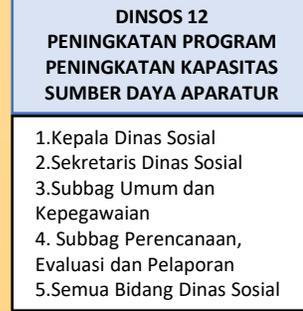
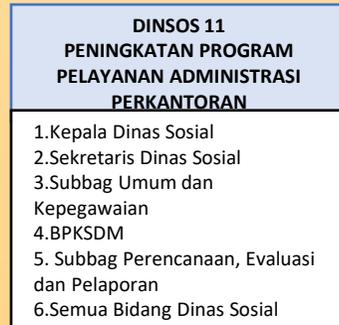
DINAS SOSIAL KABUPATEN KATINGAN

INPUT

KEBIJAKAN /
REGULASI

KOORDINASI
DAN
SINKRONISASI
DATA

PERMINTAAN
INFORMASI,
KONSULTASI
DAN
LAYANAN



OUTPUT

1. DOKUMEN SPM

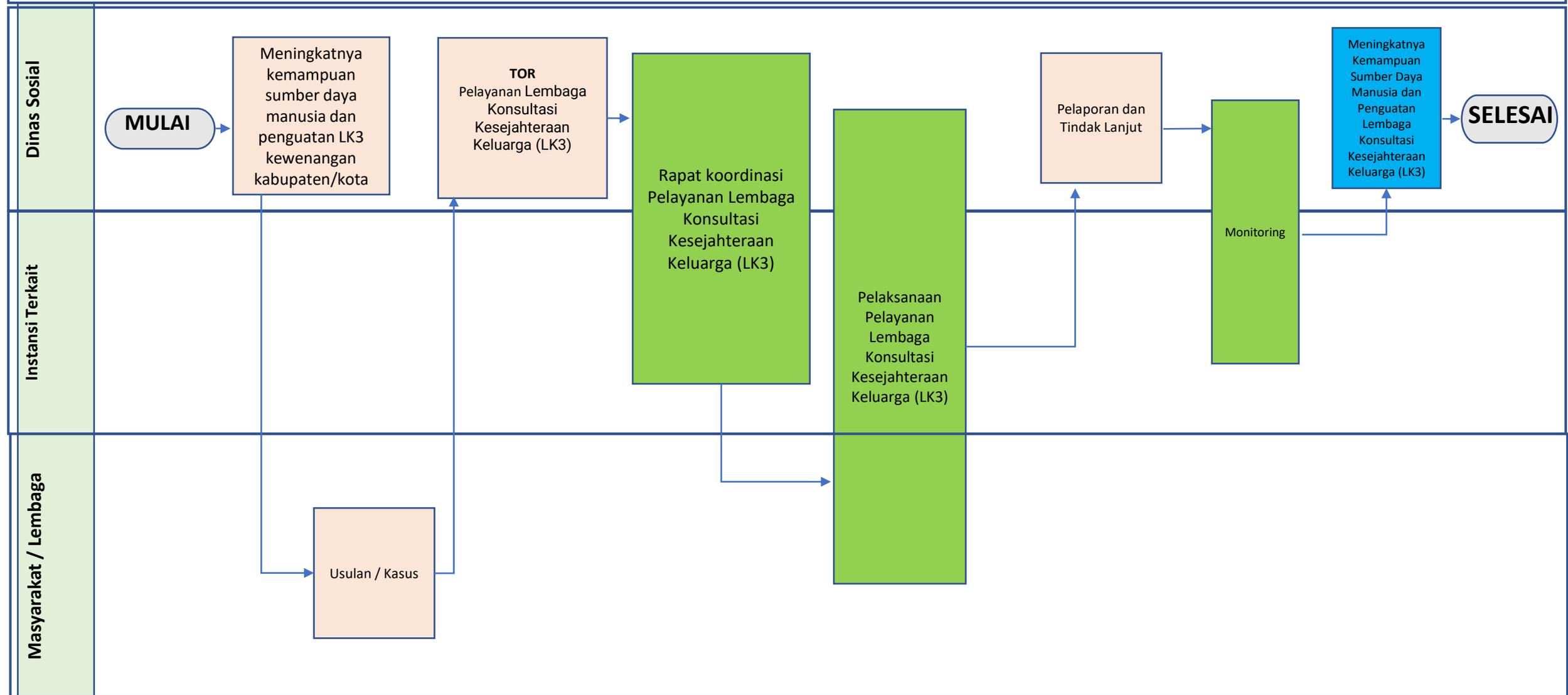
2. SDM YANG
BERKOMPETEN
DAN TERAMPIL

3. PELAYANAN
PUBLIK YANG BAIK

4. KESEJAHTERAAN
SOSIAL PPKS
MENINGKAT

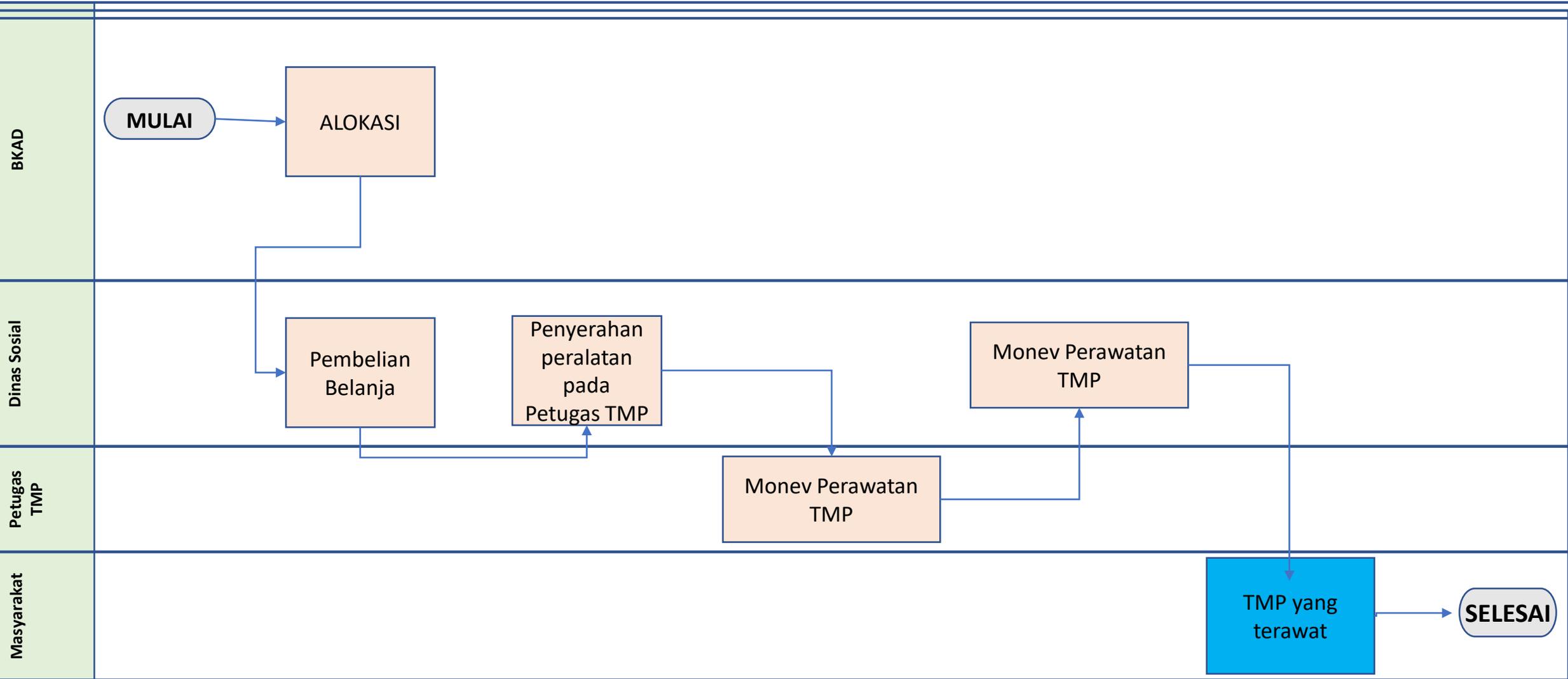
PETA LINTAS FUNGSI

DINSOS 01 PENINGKATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KAT DAN PMKS



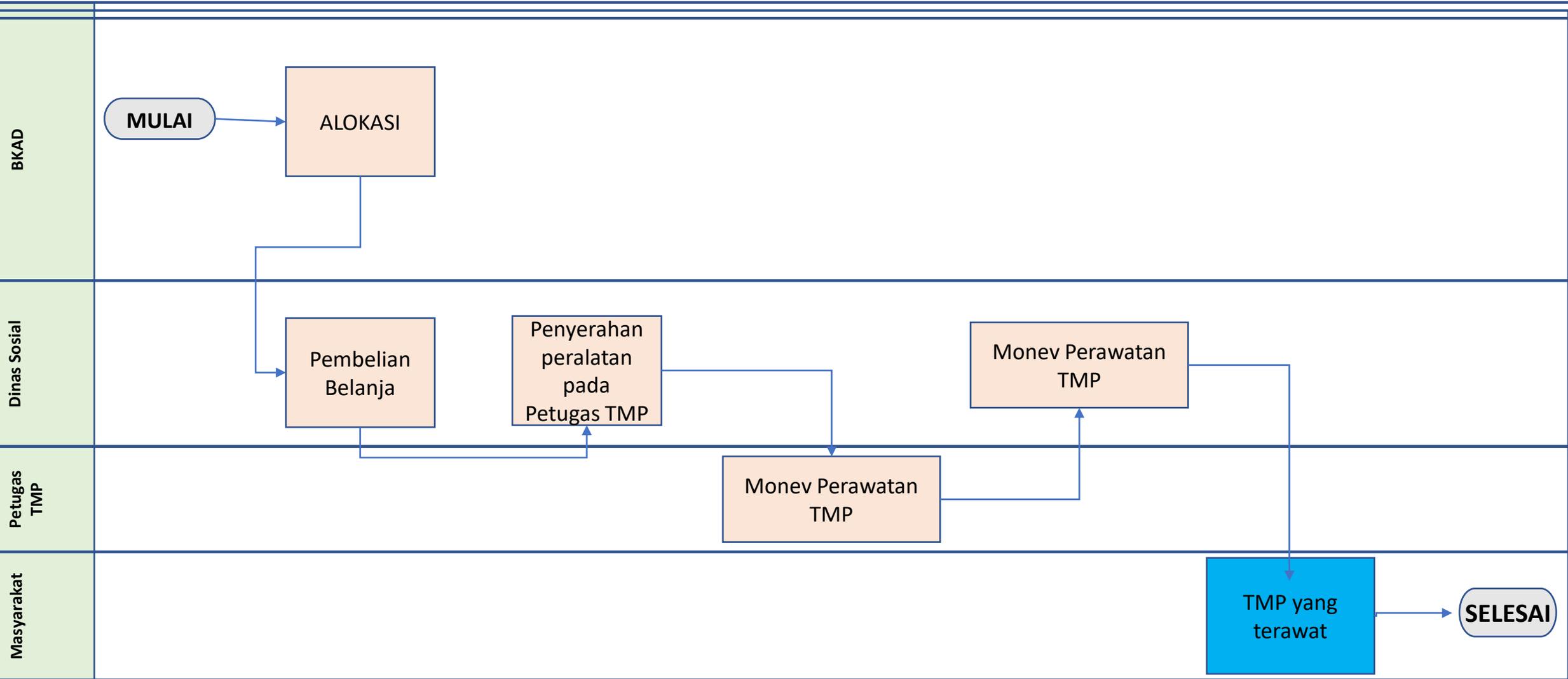
PETA LINTAS FUNGSI

DINSOS 02 PENINGKATAN PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN



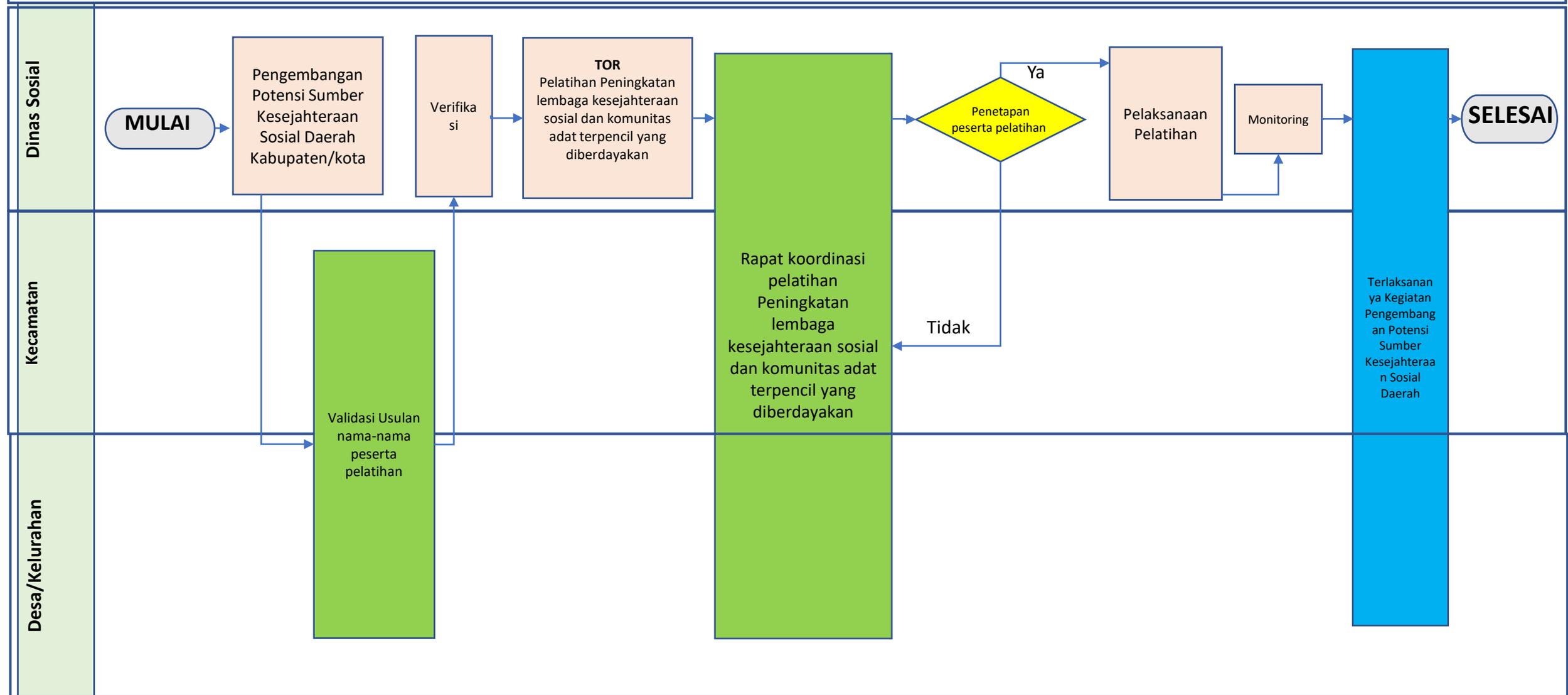
PETA LINTAS FUNGSI

DINSOS 03 PENINGKATAN PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN



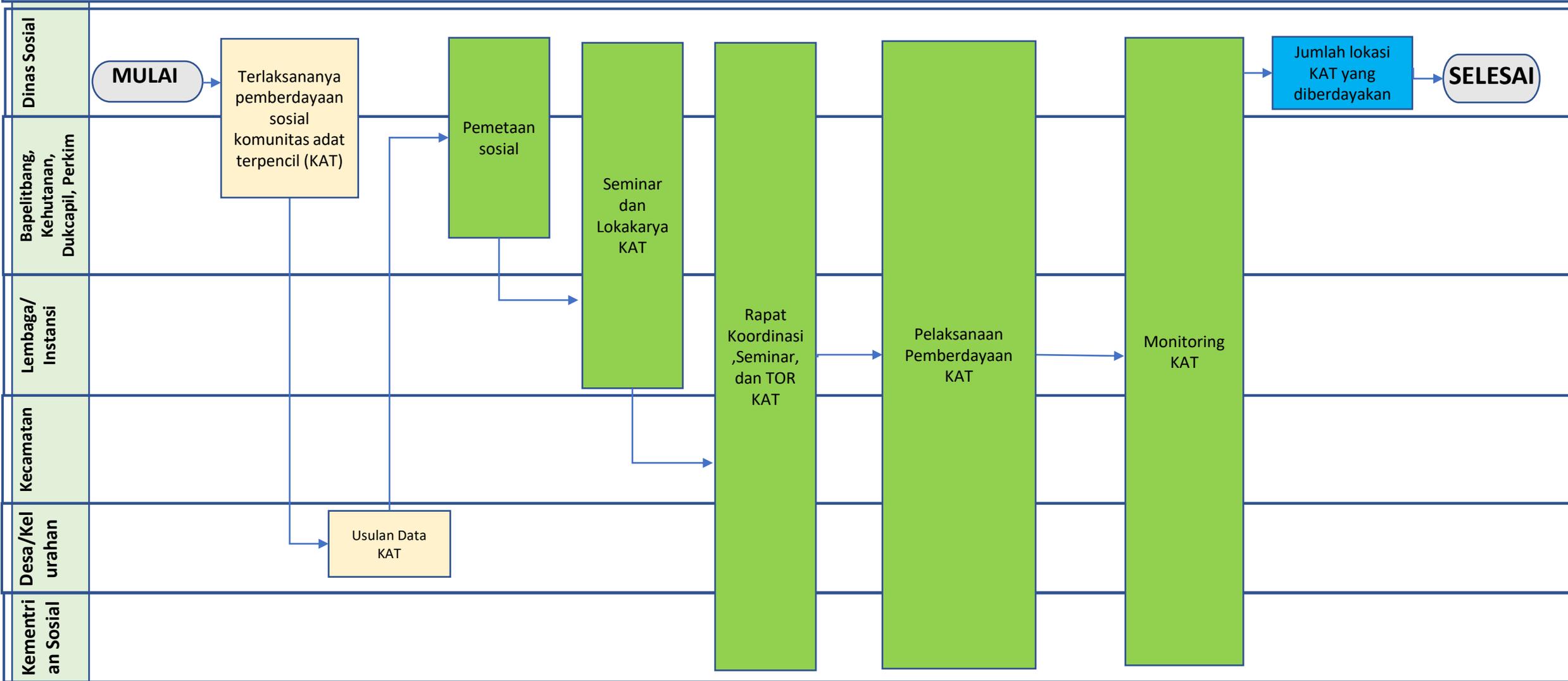
PETA LINTAS FUNGSI

DINSOS 04 PENINGKATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL



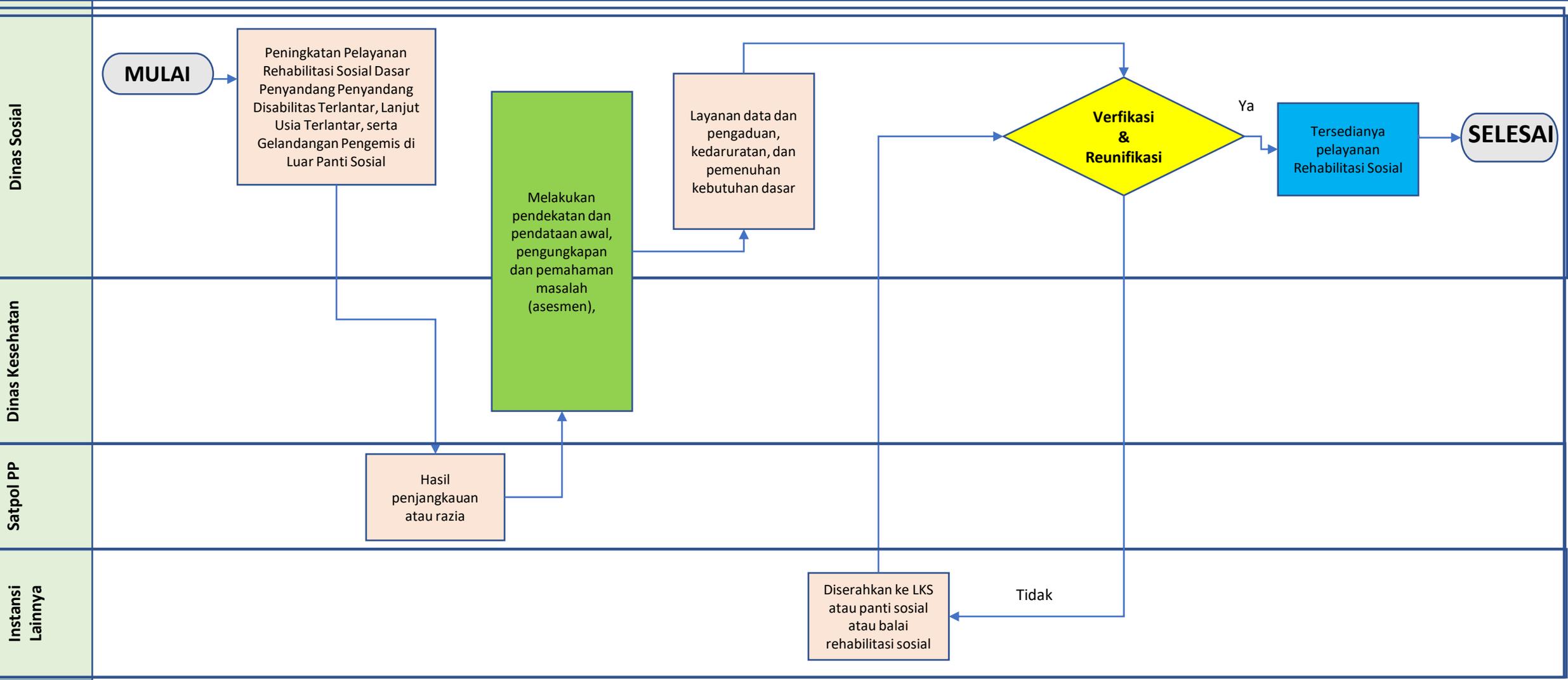
PETA LINTAS FUNGSI

DINSOS 05 PENINGKATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL



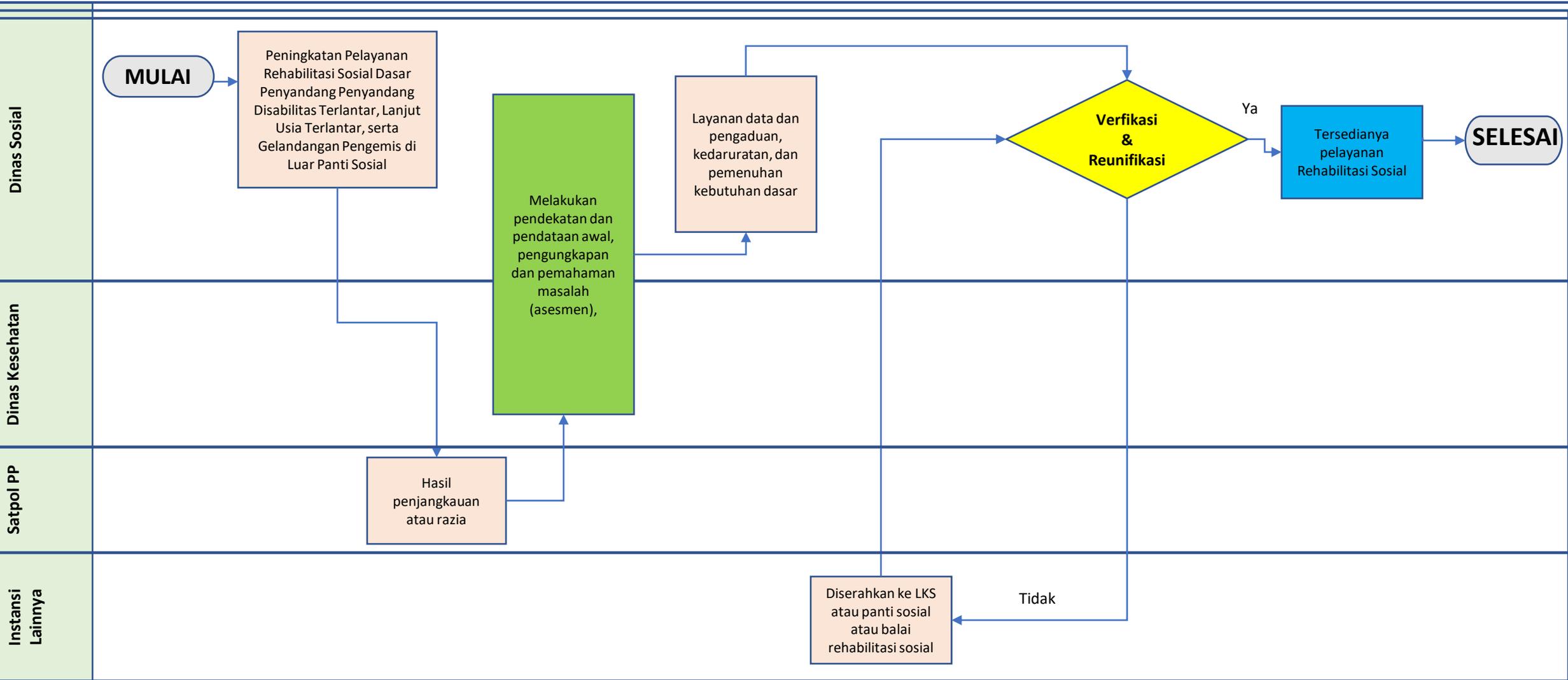
PETA LINTAS FUNGSI

DINSOS 06 PENINGKATAN PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL



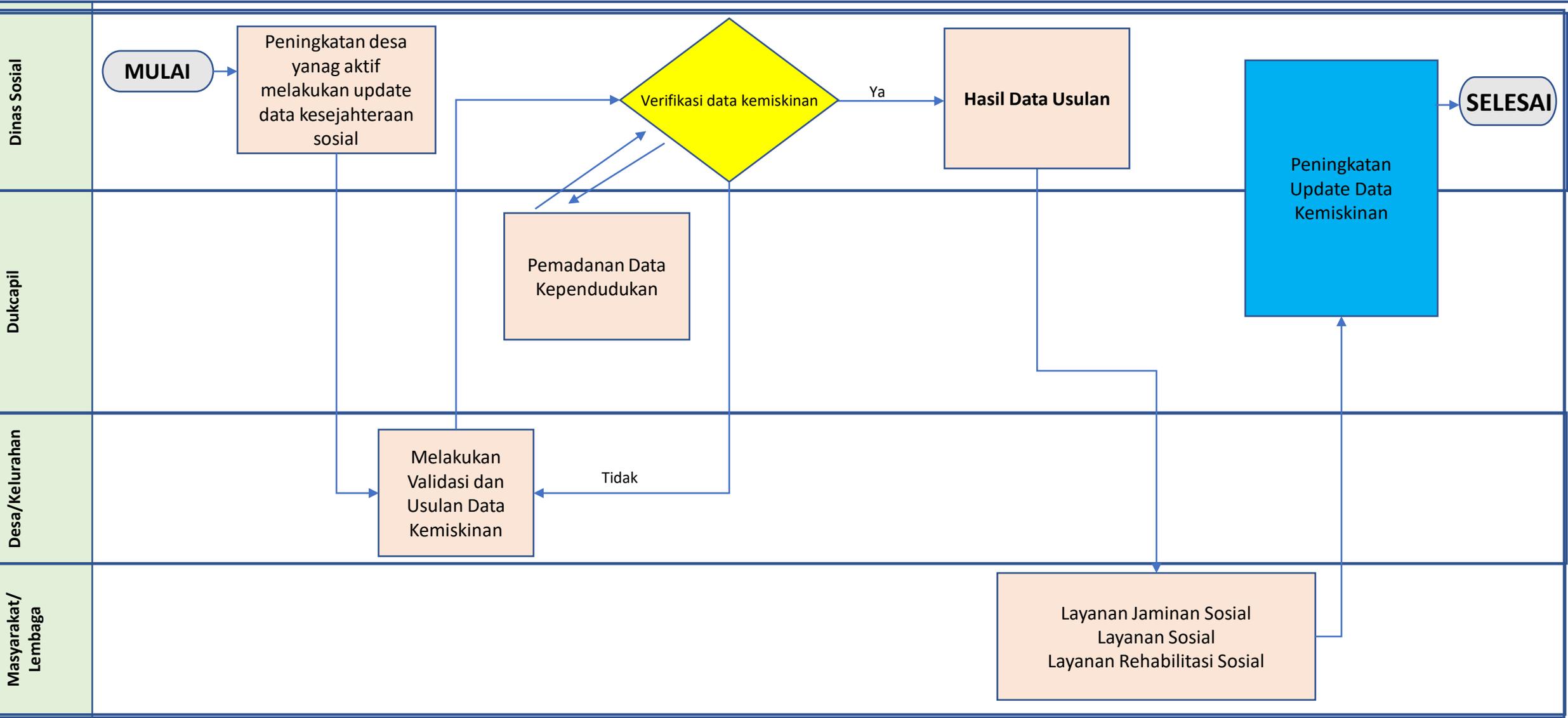
PETA LINTAS FUNGSI

DINSOS 07 PENINGKATAN PROGRAM REHABILITASI SOSIAL



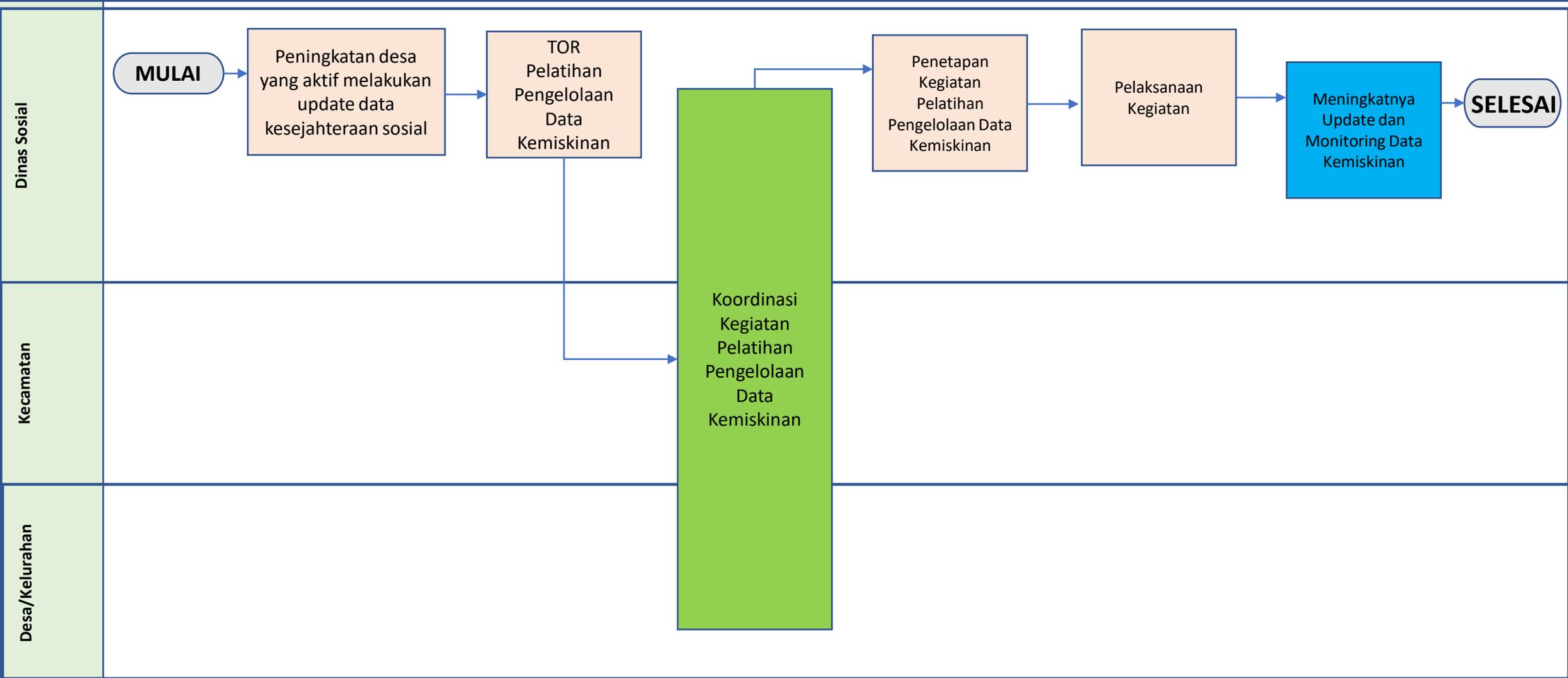
PETA LINTAS FUNGSI

DINSOS 08.01 PENINGKATAN PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL



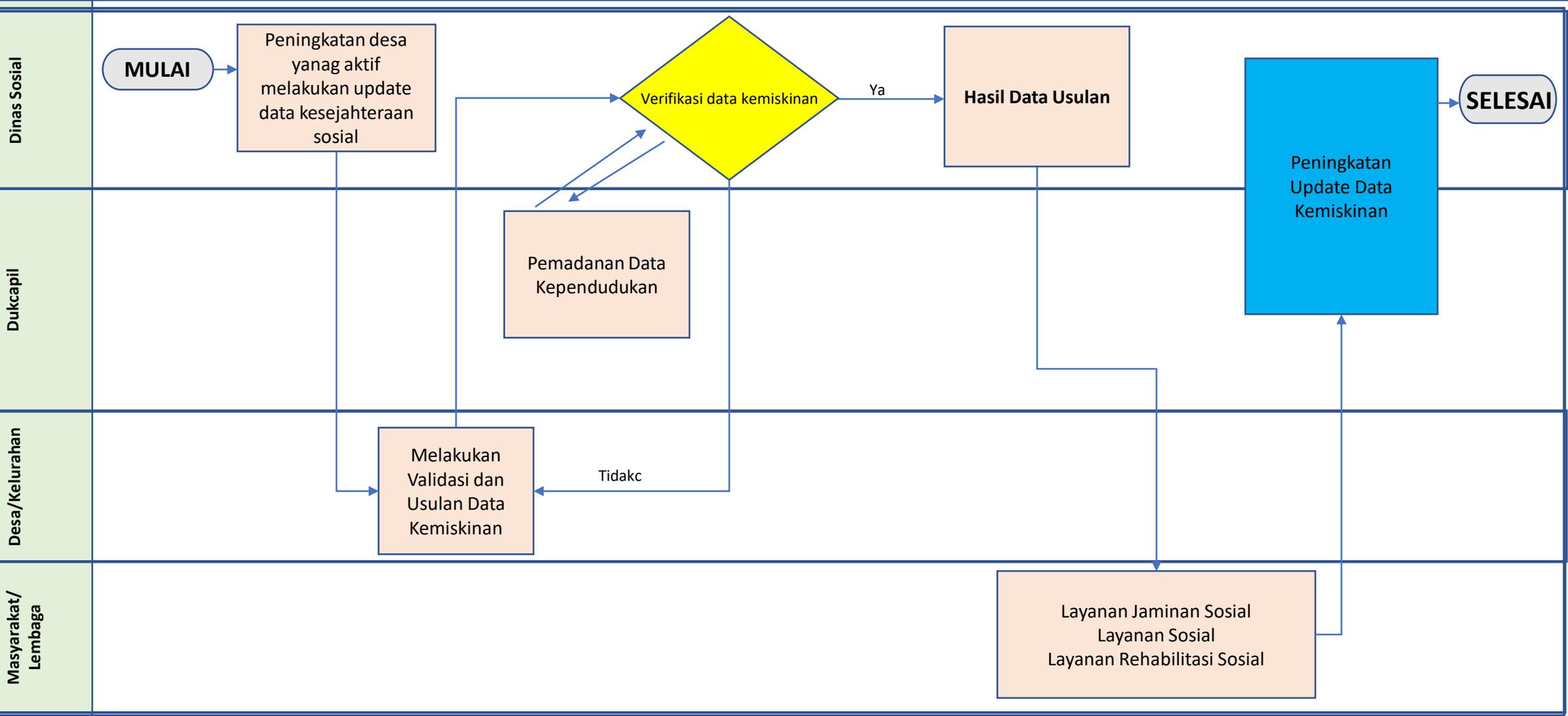
PETA LINTAS FUNGSI

DINSOS 08.02 PENINGKATAN PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL



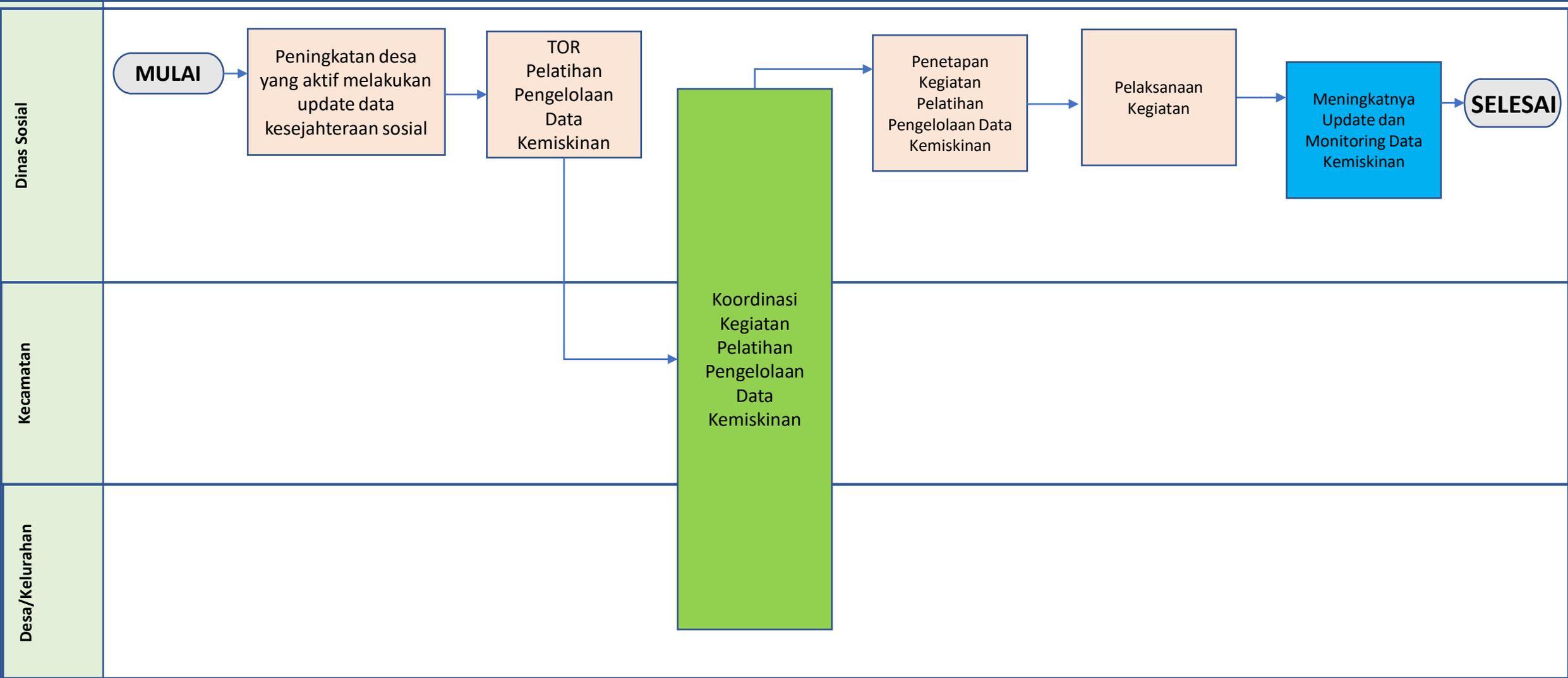
PETA LINTAS FUNGSI

DINSOS 09.01 PENINGKATAN PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA, PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL



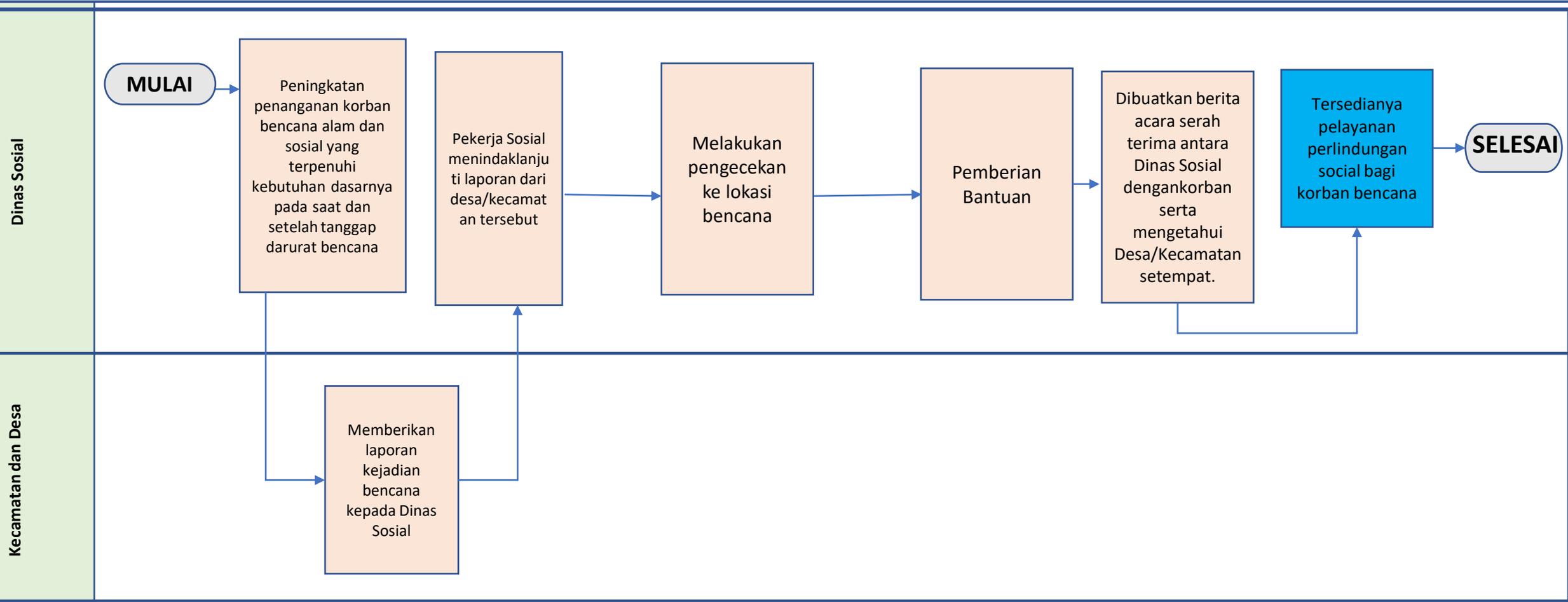
PETA LINTAS FUNGSI

DINSOS 09.02 PENINGKATAN PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA, PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL



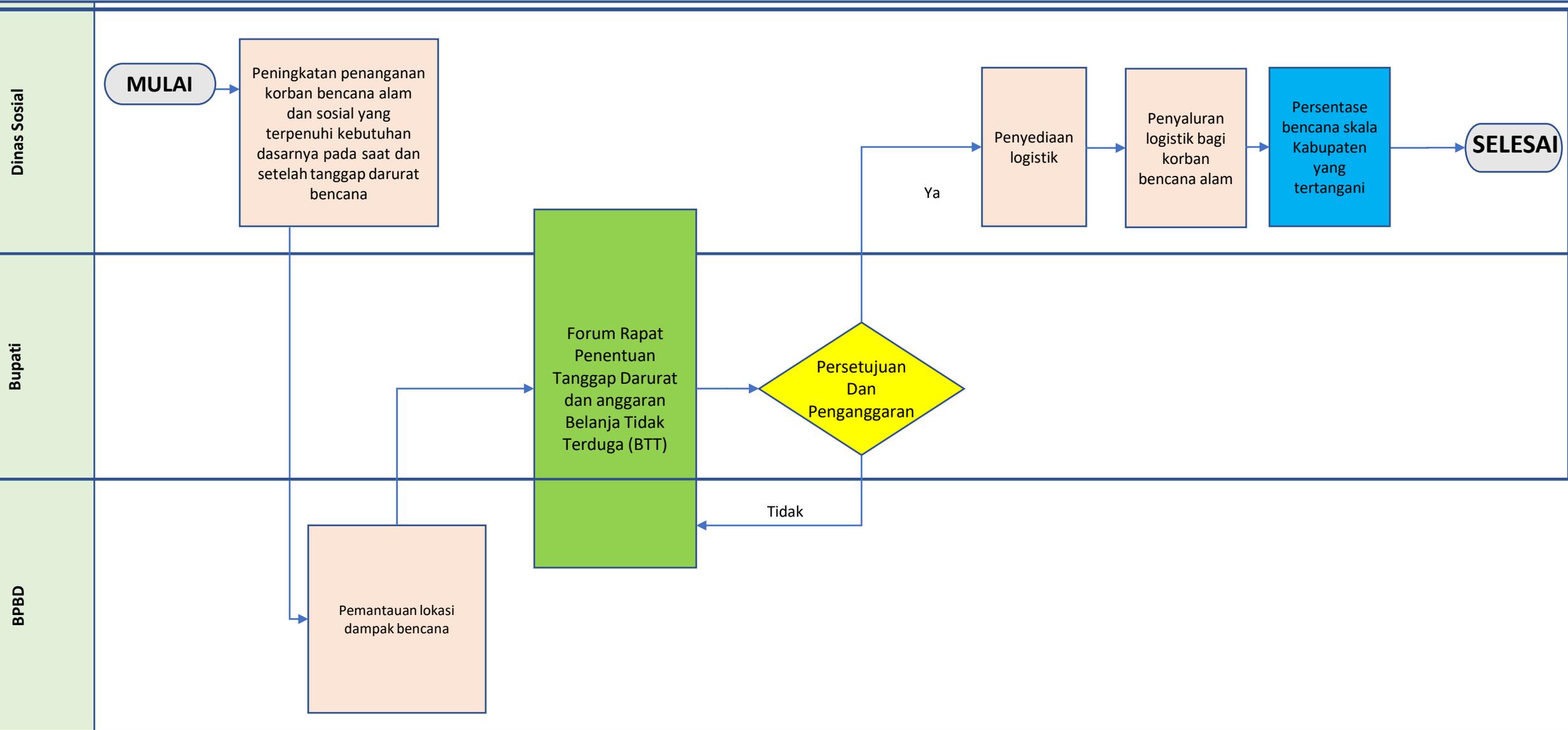
PETA LINTAS FUNGSI

DINSOS 10.01 PENINGKATAN PROGRAM PENANGANAN BENCANA



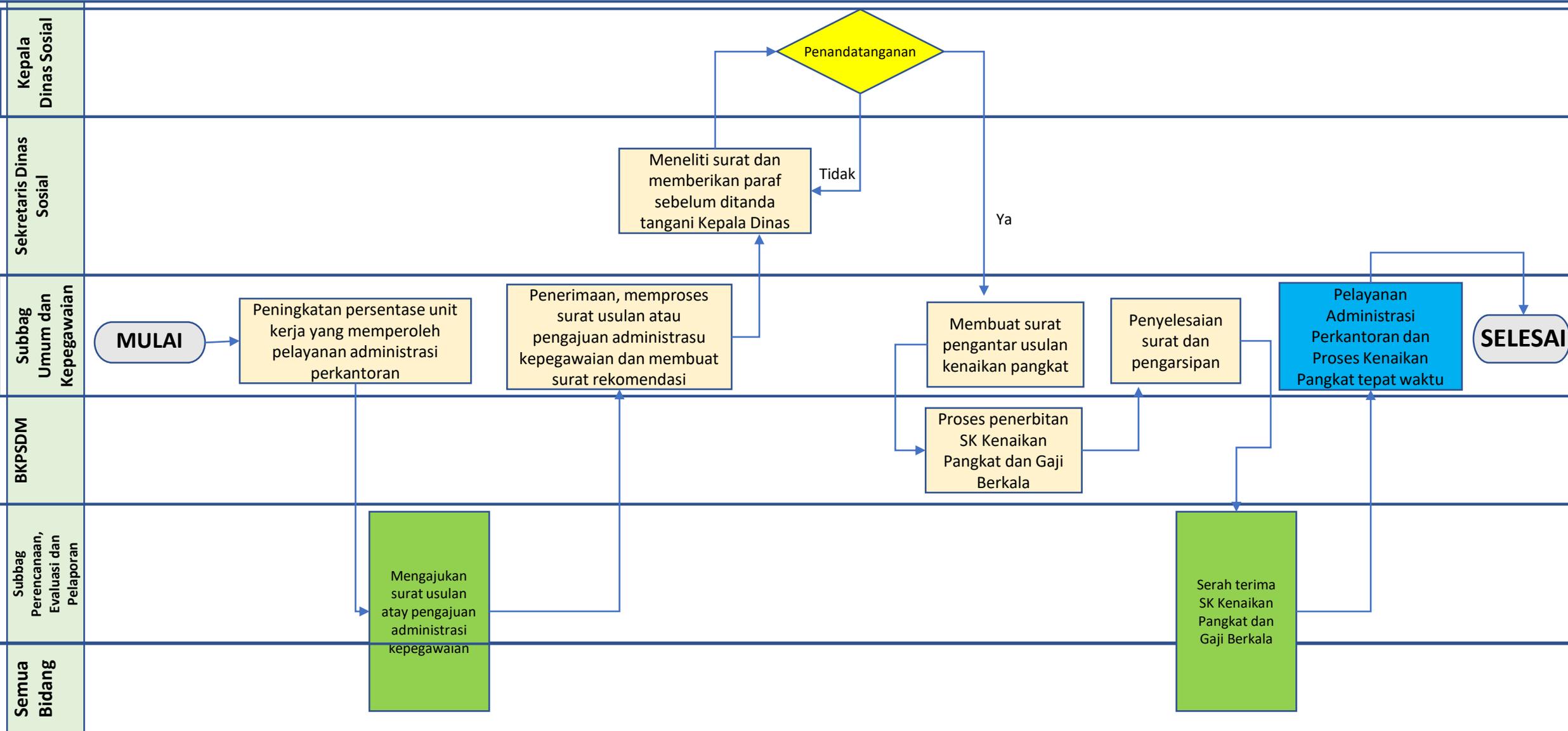
PETA LINTAS FUNGSI

DINSOS 10.02 PENINGKATAN PROGRAM PENANGANAN BENCANA



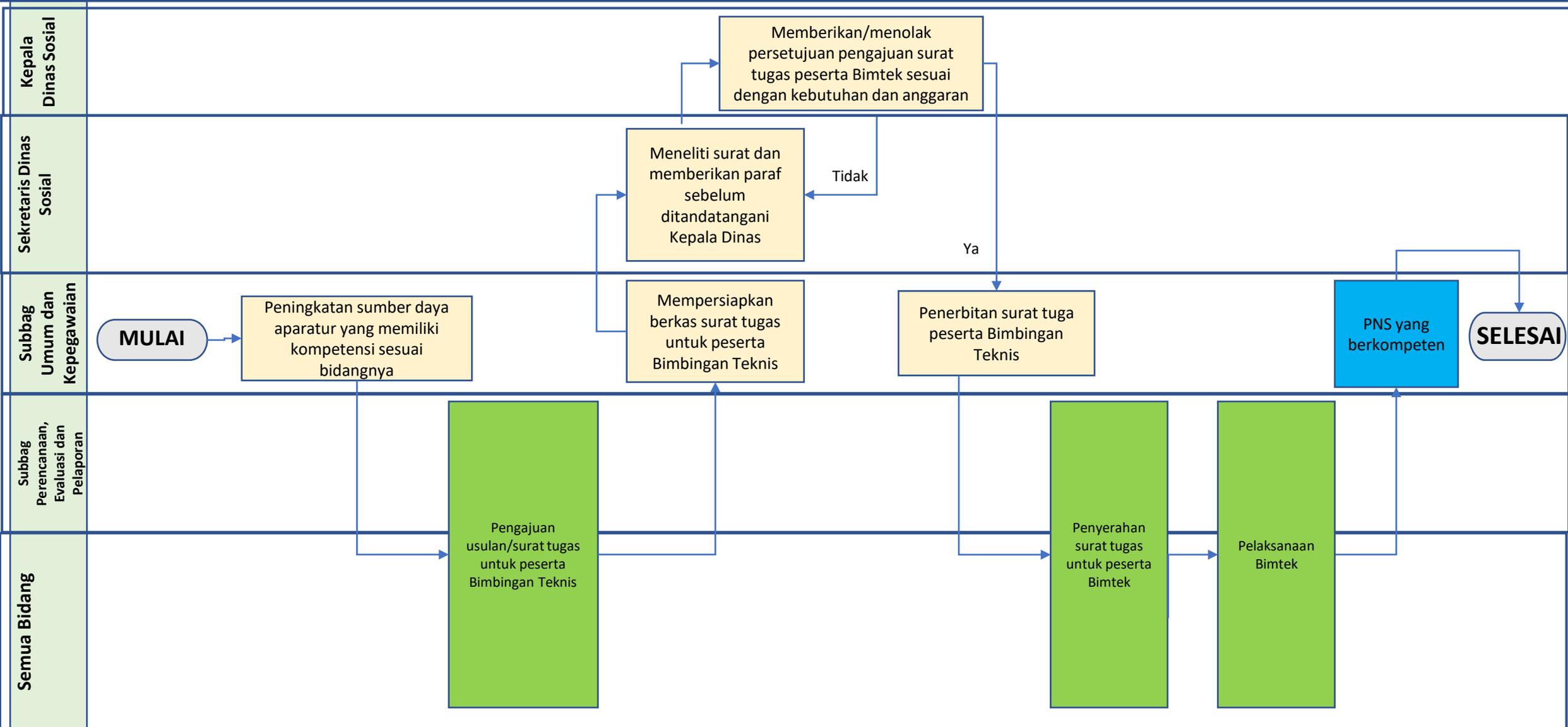
PETA LINTAS FUNGSI

DINSOS 11 PENINGKATAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN



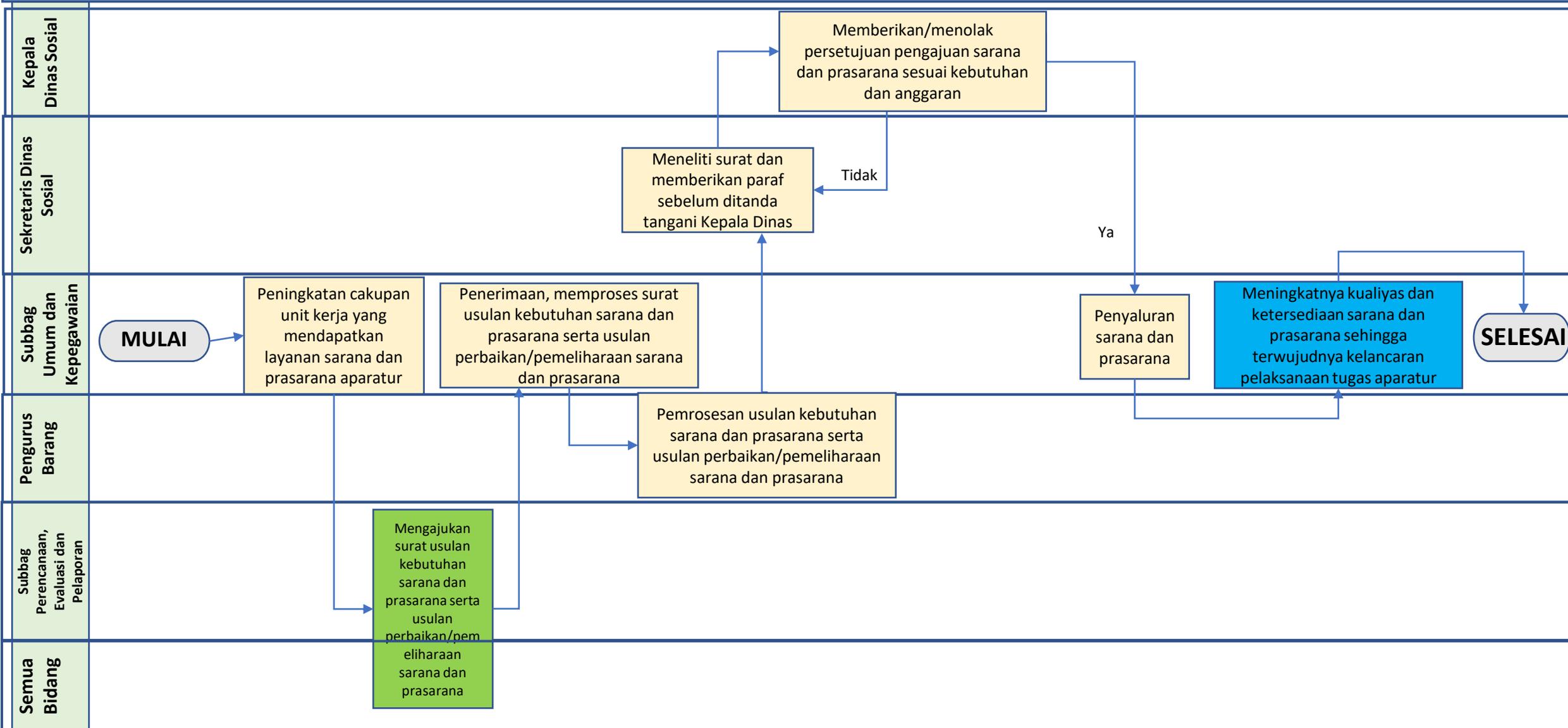
PETA LINTAS FUNGSI

DINSOS 12 PENINGKATAN PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR



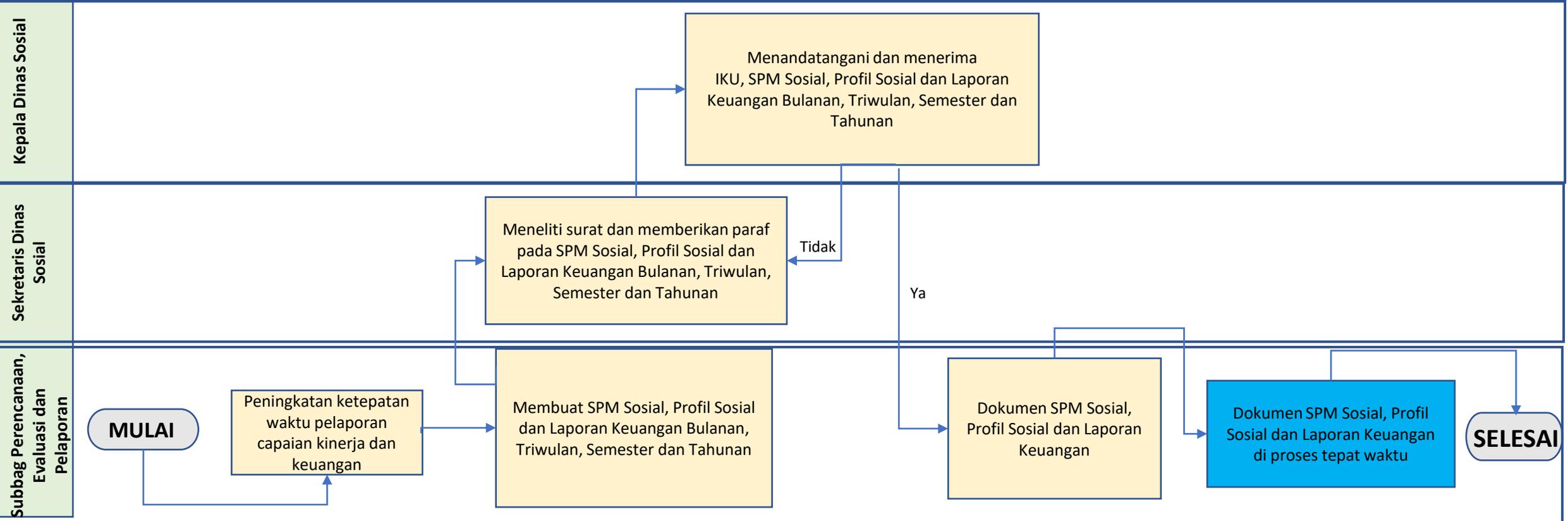
PETA LINTAS FUNGSI

DINSOS 13 PENINGKATAN PROGRAM SARANA DAN PRASARANA APARATUR



PETA LINTAS FUNGSI

DINSOS 14 PENINGKATAN PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN DAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN



PETA LINTAS FUNGSI

DINSOS 15 PENINGKATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

